



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DJPT



TRIWULAN I TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini merupakan upaya untuk memenuhi ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak tahun 2013 dan sejalan dengan proses reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja di KKP telah bertransformasi melalui metode penerapan *Balanced Scorecard* (BSC). Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Implikasi dari semua proses ini tentunya memang membutuhkan beberapa perubahan paradigma dalam penyusunan dan pengukuran kinerja. Proses transisi memang tidak mudah, tapi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap akan terus konsisten dalam mendukung upaya KKP berada dalam jalur Reformasi Birokrasi.

Semoga apa yang disajikan dalam LKJ Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 25 April 2024
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Trian Yunanda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp150.556.866.000,-. Realialisasi anggaran sebesar 40.080.158.966,- atau mencapai 26,62%. Secara kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 104,11.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2024 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mempunyai 1 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2024. Sasaran strategis, target indikator kinerja, dan capaian Setditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2024, yaitu:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian 2024	Persentase
1	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan (persen)	80	73,33	91,66
		2	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100		
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80		
		4	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80		
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84		
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	94		
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,3	89,89	101,80%
		8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,3		
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84		
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)	100		
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94	133,33	120%
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	100	100	100%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target PK	Capaian 2024	Persentase	
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	81	88	108,64%
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1		
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100		
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100		
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100		
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76		
		19	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86		

DAFTAR ISI

URAIAN		HALAMAN
KATA PENGANTAR		1
RINGKASAN EKSEKUTIF		2
DAFTAR ISI		4
DAFTAR GAMBAR		6
DAFTAR TABEL		7
BAB I	PENDAHULUAN	8
1.1	Latar Belakang	8
1.2	Maksud dan Tujuan	10
1.3	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
1.4	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	11
1.5	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
2.1	Rencana Strategis	13
2.2	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	13
2.3	Rencana Aksi	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1	Capaian Kinerja Sekretariat	17
3.2	Analisis Capaian Kinerja	19
3.2.1	Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	19
A	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	19
B	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (persen)	20
C	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	20
D	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	20
E	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	21
F	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	22
G	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	22
H	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	24
I	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	24
J	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)	25
K	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem	25

	manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	
L	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)	27
M	Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)	28
N	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	28
O	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)	29
P	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	29
Q	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	29
R	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30
S	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30
3.3	Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	31
BAB IV PENUTUP		32
LAMPIRAN		33

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1	Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024	11
2	Dashboard Aplikasi Kinerja Sekretariat DJPT Triwulan I tahun 2024	17
3	Nilai SKM DJPT triwulan I tahun 2024	23

DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	HALAMAN
1	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2024	17
2	Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)” triwulan I tahun 2024	19
3	Capaian IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” triwulan I tahun 2024	23
4	Capaian IKU “Persentase unit kerja Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” triwulan I tahun 2024	26
5	Capaian IKU “Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap” triwulan I tahun 2024	27
6	Capaian IKU “Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra (persen) “triwulan I tahun 2024	28
7	Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja	31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai potensi laut yang begitu besar. Dengan luas laut 70% dari luas daratan, Indonesia menyimpan banyak potensi, mulai dari sektor industri maritim, pertambangan, energi, pariwisata, jasa kelautan sampai ke sektor perikanan. Namun demikian, Bapak Presiden mengingatkan, di tengah potensi yang besar tersebut, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih tergolong rendah yakni masih di bawah 30%. Ini pemacu bagi kita semua untuk bekerja lebih keras lagi. Dengan modal potensi sumber daya ikan yang begitu besar dan didukung jumlah nelayan di Indonesia mencapai 2,6 juta orang, terdiri dari 2,2 juta nelayan di laut dan 378 ribu nelayan di perairan darat. Para nelayan ini tersebar setidaknya di 12.857 desa pesisir di Indonesia. Dengan jumlah SDM yang begitu besar, sub sektor perikanan tangkap diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi di masa depan. Sehubungan dengan besarnya potensi sumber daya ikan dan dengan arahan Bapak Presiden untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong tiga prioritas kegiatan yaitu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan program budidaya dalam negeri sebagai sumber ekonomi. Guna mendukung tiga prioritas kegiatan KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melakukan upaya langkah percepatan. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan

lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (*control*) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat menjadi modal dasar dalam menyongsong tercapainya visi Indonesia emas 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas yang telah di tetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yakni Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Guna mengoptimalkan potensi perikanan yang kita miliki dengan tetap memperhatikan kesehatan ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip Ekonomi Biru dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk terobosan dari Ekonomi Biru adalah kebijakan Penangkapan Ikan Terukur agar pengelolaan sumber daya ikan menjadi semakin berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan berbagai langkah upaya guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang Ekonomi Biru. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terdapat 19 Indikator Kinerja Utama dan Manajerial yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan membagi dalam 5 bagian pelaksanaan kinerja dilaksanakan oleh 5 Unit Tim Kerja yaitu Kelompok Kerja Program, Kelompok Kerja Keuangan dan Umum, Kelompok Kerja Hukum, Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, serta Kelompok Kerja SDM Aparatur dan Organisasi.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, maka capaian kinerja tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama triwulan I tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
7. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
9. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi;
3. Tim Kerja Hukum;
4. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
5. Tim Kerja Keuangan dan Umum.

Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024

1.4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang ada di Sekretariat berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan **“Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)
 - b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - c. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - d. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - f. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - g. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)
 - h. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - i. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
 - j. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)
 - k. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
 - l. Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)
 - m. Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)
 - n. Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)
 - o. Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)
 - p. Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)
 - q. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)
 - r. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

- s. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah- langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang di Perbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Serta sehubungan dengan prinsip ekonomi biru yang dijalankan oleh KKP dan implementasi Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang mana mendukung pembangunan subsektor perikanan tangkap dan Permen KP 28 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, pada tahun 2024 satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyusun berbagai indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang dapat mendukung hal tersebut.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan.

2.3. Rencana Aksi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN															
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1 Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan (persen)	320.350.000	Dokumen	2							1								1	
	2	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	172.208.000	Dokumen	1																1
	3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	6.250.000.000	Dokumen	4			1			1							1			1
	4	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	256.440.000	Laporan	1		1														
		Penyelenggaraan dan sosialisasi ketentuan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	734.600.000	Laporan	1			1													
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.008.960.000	Dokumen	1													1			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN																
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
	5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Penyusunan Laporan Tahunan 2023, Refleksi 2022 Outlook 2024	83.350.000	Laporan	1		1														
			Finalisasi Laporan Kinerja Tahun 2023 Ditjen Perikanan Tangkap beserta data dukungnya	48.980.000	Laporan	1			1													
			Pengukuran Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja I, II dan III Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024	56.400.000	Dokumen	3				1					1							1
			Pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup DJPT bersama Menpan RB	495.620.000	Dokumen	4			1			1					1					1
			Pelaksanaan Pendampingan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	253.000.000	Laporan	2						1										1
			Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi	117.058.000	Dokumen	2						1										1
			Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP	513.000.000	Dokumen	2					1											1
			Ketatalaksanaan Organisasi	271.000.000	Dokumen	2						1										1
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	466.000.000	Dokumen	2						1										1
			6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Monitoring dan evaluasi rekonsiliasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	11.581.230.000	Laporan	1														
7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.157.026.500	Dokumen	1															1		
	8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW I Ta.2024 Lingkup DJPT	238.250.000	Dokumen	1			1													
			Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW II TA.2024 Lingkup DJPT	117.000.000	Dokumen	1						1										
			Penyusunan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan TA.2024 Lingkup DJPT	61.500.000	Dokumen	2						1										1
			Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP TA.2024 Lingkup DJPT	44.250.000	Dokumen	1																1
			Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW III TA.2024 Lingkup DJPT	116.878.000	Dokumen	1												1				
			Penyusunan Manajemen Resiko TA.2025 Lingkup DJPT	322.106.000	Dokumen	1																1
			Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW IV TA.2024 Lingkup DJPT	117.000.000	Dokumen	1																1
			Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup DJPT	58.500.000	Dokumen	1																1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN																	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	2.244.000.000	Dokumen	1											1						
			Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	2.036.000.000	Dokumen	1															1		
	10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.478.650.000	Dokumen	1													1				
			Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan	1.276.300.000	Dokumen	1																	1
	11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	Monitoring dan evaluasi unit kerja Sekretariat yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	95.266.708.000	Dokumen	4			1					1						1		1	
			Gaji dan Tunjangan	55.230.761.000		0																	
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	40.035.947.000																			
	12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.157.026.500	Dokumen	1																1	
	13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	Kerjasama Internasional lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.700.000.000	Dokumen	1														1			
			Kerjasama Antarlembaga lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	800.000.000	Dokumen	1																	1
	14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.800.000.000	Dokumen	1			1														
			Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.000.000.000	Dokumen	0																	
			Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	800.000.000																			
	15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	Pendampingan hukum	245.050.000	Dokumen	1								1									
	16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.359.275.000	Dokumen	4			1					1					1			1	
			Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	855.550.000	Dokumen	2					1												1
	17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	Pengolahan Data perikanan tangkap tahun 2023 untuk kebutuhan Organisasi Regional (RFMOs) dan organisasi Internasional (FAO,SEAFDEC, dll)	358.275.000	Laporan	1								1									
			Bimtek penguatan pendataan tuna di Samudera Hindia untuk kebutuhan regional dan internasional IOTC	562.175.000	Laporan	1													1				
			Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data	2.691.475.000	Dokumen	2																	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Sekretariat. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Sekretariat triwulan I tahun 2024 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2024

Capaian kinerja Sekretariat pada triwulan I tahun 2024 adalah kategori baik, hal ini ditandai dengan nilai Capaian Kinerja IKU sebesar 104,11%. Nilai Capaian Kinerja triwulan I tahun 2024 ini merupakan gambaran dari 5 (lima) capaian dari 19 (sembilan belas) Indikator kinerja yang sudah ada capaiannya pada tahun 2024. Berdasarkan 5 indikator yang ada, terdapat 4 indikator capaian sudah kategori baik/istimewa dan 1 capaian kategori istimewa.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2024.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Capaian 2024	Persentase
1 Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan (persen)	80	73,33	91,66

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target PK	Capaian 2024	Persentase
		2	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80	
		4	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80	
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84	
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	94	
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,3	89,89 101,80%
		8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,3	
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84	
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94	133,33 120%
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	100	100 100%
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	81	88 108,64%
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1	
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100	
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100	
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100	
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76	
		19	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

2.2.1. Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

A. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)

Pengertian dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan I Tahun 2024. Cara penghitungannya dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT.

Tabel 2. Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)” triwulan I tahun 2024”.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 1					Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)						
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
	10	73,79	62,07	84	80	80	73,33	91,66	91,66	91,66	91,66

Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2024 ini diperoleh dari perhitungan total temuan awal dibandingkan dengan temuan yang telah ditindaklanjuti. Persentase capaian realisasi yaitu 91,66%. Hal ini dapat dicapai oleh karena adanya temuan awal yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Ditjen PT, kedepannya perlu diupayakan peningkatan penyelesaian dan tindaklanjut atas temuan yang ada. Perlu ada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Inspektorat II sehingga seluruh temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Pada periode triwulan IV 2023 s.d. triwulan I 2024 terdapat 60 rekomendasi saran dan telah ditindaklanjuti 44 saran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022, capaian tahun 2024 sudah lebih tinggi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan capaian, hal ini dikarenakan adanya 16 rekomendasi yang muncul rekomendasinya belum di tindaklanjuti. Adapun LHP yang belum di seluruhnya ditindak lanjuti diantaranya adalah Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Nomor R.235/ITJ.2/HP.460/X/2023) dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2023 (Nomor R.348/ITJ.2/HP.470/XII/2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu

antara lain dengan upaya efisiensi Penggunaan Sumber Daya, efisiensi penggunaan teknologi digunakan dalam proses koordinasi dengan seluruh satker lingkup DJPT. Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan tindaklanjut penyelesaian serta mengadakan rapat pemutakhiran data pada 28 Maret 2024 secara daring terhadap 22 satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

B. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit Eselon I.

Perhitungan IKU ini didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk tahun 2024, batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan tidak boleh melebihi 1%. IKU ini bersifat tahunan dan belum dapat direalisasikan karena capaian didapatkan setelah hasil audit BPK selesai.

C. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan triwulan I-2024, IKU ini belum dilakukan pengukuran, adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

D. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024, IKU ini belum dilakukan pengukuran, adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%); dan
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- c. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2018-2023 (bobot 20%);
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah
- e. Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- f. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

E. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP DJPT pada 2023 adalah 80,5 (kategori A/ Memuaskan). Realisasi capaian Nilai AKIP pada triwulan III adalah sebesar 82,94 predikat penilaian A, berdasarkan Surat Inspektur II Nomor R.166/ITJ.2/HP.470/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Realisasi capaian Nilai AKIP tahun 2024 belum tersedia pada triwulan I, dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan dan untuk penilaian AKIP DJPT akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 atau awal triwulan III tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun yang akan datang, yaitu:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Pusat dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPT;

3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid; dan
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

Sekretariat DJPT pada tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya untuk peningkatan nilai SAKIP, diantaranya adalah dengan melaksanakan dialog kinerja DJPT dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan penetapan target indikator kinerja tahun 2024 lingkup Direktorat dan UPT Pusat; dan menyusun dokumen perencanaan meliputi perjanjian kinerja, manual iku, dan rencana aksi tahun 2024. Selain itu, pada triwulan I tahun 2024, telah dilaksanakan pengukuran dan verifikasi capaian kinerja untuk seluruh satker lingkup DJPT.

F. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator tersebut merupakan kegiatan penilaian rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rekonsiliasi dimaksud dilakukan atas komponen-komponen kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen Nilai Rekonsiliasi terdiri dari kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan. Pada tingkat Eselon II KKP, penilaian terhadap Nilai Rekonsiliasi dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja masing-masing Eselon II. Saat ini belum terdapat nilai capaian karena IKU ini di laksanakan sebagai tindaklanjut dari PM SAKIP DJPT. Dalam pelaksanaannya, rekonsiliasi Kinerja dan Reviu Mandiri Laporan Kinerja satker Direktorat Jenderal Perikanan Tangka penilaiannya memperhatikan aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (bobot 30%).

G. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran, sebagai berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” triwulan I tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 1					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap						
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					88,30	88,30	89,89	101,80	101,80		

Pada triwulan I tahun 2024, . jumlah responden sebanyak 4.287 dengan hasil SKM 89,892 (kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Terdapat peningkatan Nilai SKM tiap triwulan mulai tahun 2023 sampai dengan triwulan I tahun 2024 seperti yang tergambar pada grafik di bawah.



Gambar 3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DJPT

Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 39 berdasarkan Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2022. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP. Masih terdapat UPP dengan hasil SKM dibawah nilai target Indikator Kinerja sebesar 88,30. Bagi UPP yang belum mencapai target diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberian pelayanan dengan memperhatikan nilai perunsur SKM dan saran/komentar dari pengguna jasa. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,596. Berdasarkan hasil validasi SKM, 3 unsur terendah secara kumulatif dari seluruh UPP adalah U3 Waktu Penyelesaian, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memperbaiki waktu penyelesaian layanan yang diajukan oleh pengguna jasa agar sesuai dengan Standar Pelayanan, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

H. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terde20inisi), Level (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Pada triwulan I Tahun 2024, capaian indikator ini belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.

I. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut :

- a. Dimensi kualifikasi, menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- b. Dimensi kompetensi, merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus;
- c. Dimensi Kinerja, menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menilai hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai;
- d. Dimensi Disiplin, menunjukkan riwayat hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada pegawai dalam periode 1 (satu) tahun.

Capaian IP ASN diukur secara semesteran. Selama triwulan I-2024 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan ketrampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi yang bersangkutan;
2. Meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaian;
3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi pegawai yang bersangkutan; dan

4. Monitoring dan evaluasi presensi.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih user friendly. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan, dan pendidikan bagian pegawai.

J. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Penilaian capaian presentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap didapatkan dari persentase perbandingan Jumlah Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dibandingkan dengan Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang sudah direncanakan sebelumnya.

Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap (persen) merupakan IKU yang capaiannya tahunan, sehingga untuk triwulan I-2024 belum terdapat capaian. Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus melakukan upaya aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap.

K. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi *Colaboration Office*).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui

penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 4. Capaian IKU “Persentase unit kerja Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” triwulan I tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 11					Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)						
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
		100	97,57	100	94	94	133,33	141,84	141,84	90	148,14

Realisasi IKU ini pada triwulan I tahun 2024 mencapai 141,84 %. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk sharing informasi dan pengetahuan. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan triwulan I tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024 tanggal 2 April 2024 hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan I 2024 dan Memorandum Seditjen PT Nomor 929/DJPT.1/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPT.

Secara keseluruhan hasil capaian IK Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Eselon II DJPT pada Triwulan I Tahun 2024 telah melampaui target, dengan capaian sebagai berikut.

No.	Nama Eselon II	Nilai Target	Nilai Capaian TW I (100%)*
1	Sekretariat	94	133,33
2	Dit.PSDI	94	133,33
3	Dit. KAPI	94	133,33
4	Dit.KP	94	133,33
5	Dit.PDK	94	133,33
DJPT		94,00	133.33

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yakni tingkat keaktifan pengguna yang baru meningkat di akhir triwulan berjalan. Oleh karena itu upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IKU antara lain : (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) aktif dalam melakukan *follow up* pada semua level unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen), pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : memaksimalkan peran serta seluruh pegawai lingkup Ditjen PT, memanfaatkan semua teknologi informasi yang dapat digunakan serta aplikasi *Colaboration Office* dalam mencapai capaian IKU ini; dan
2. Koordinasi yang baik antar pegawai lingkup DJPT.

L. Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)

Jumlah pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimuat di media massa baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki tone atau nuansa netral dan positif dibandingkan jumlah seluruh berita. Perhitungan indikator ini berasal dari rekapitulasi banyak berita yang bersumber dari media daring (*online*) dan media cetak selama satu triwulan di tahun 2024 yang mengandung substansi kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap dan digabungkan dijumlahkan dengan banyak berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan terkait sektor kelautan dan perikanan dibidang perikanan tangkap kemudian dikalikan dengan seratus persen untuk mendapatkan persentase Rasio berita netral dan positif lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 5. Capaian IKU “Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap” triwulan I tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 12					Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
					100	100	100	100	100			

Rekapitulasi berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat netral terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap sebanyak 549 pemberitaan, terdiri dari 522 pemberitaan positif, 27 pemberitaan bersifat netral. Maka rasio yang tercapai pada tahun anggaran triwulan I 2024 sebanyak 100%. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023, yang mana capaian pemberitaan positif 98,06% (meningkat 1,94%). Adapun pemberitaan yang dominan sepanjang triwulan I tahun 2024 terkait dengan Benih Bening Lobster (BBL), Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Kampung Nelayan Modern (Kalamod), dan Asuransi Nelayan (Asnel).

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase), pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan penggunaan seluruh komponen sosial media dan portal KKP dalam rangka publikasi pemberitaan terkait dengan perikanan tangkap; dan
2. Komunikasi dengan berbagai media pers baik cetak maupun online.

M. Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)

Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra merupakan Persentase Capaian pelaksanaan kegiatan Kerja Sama berupa Output dan Outcome, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Matrik Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama. Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan pengukuran capaian implementasi MoU dan pengukuran capaian implementasi PKS.

Tabel 6. Capaian IKU “Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)” triwulan I tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 13					Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd TW I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					81	81	88	108,64	108,64		

Pada triwulan I tahun 2024, terdapat 28 ruang lingkup kerja sama dari 9 mitra (BPJS Ketenagakerjaan, YII, YKAN, DPLK BRI, CTC Foundation, Starling Resources, WWF Indonesia, MDPI, Pertamina Patra Niaga). Berdasarkan arahan Biro Perencanaan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama antarlembaga pada tanggal 11-12 Januari 2024, 4 mitra yang berada dalam pemantauan TPOA (RARE, EDF, SFP, dan MSC) tidak masuk dalam perhitungan persentase capaian oleh DJPT. Perhitungan tersebut akan dilakukan oleh Biro Perencanaan. Persentase capaian mitra diperoleh dari penjumlahan angka persentase dibagi dengan jumlah ruang lingkup. Kemudian secara keseluruhan diperoleh angka agregat 88%.

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen), pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : optimalisasi waktu pelaksanaan sehingga dapat terlaksana sebelum masa waktu kerja sama berakhir.
2. Koordinasi yang baik antar satker ataupun stakeholder yang terlibat.

N. Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)

Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik merupakan terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No.30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu:

1. Memberikan perbaikan pelayanan publik;
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat;
3. Dapat dan/atau sudah direplikasi.(role model);
4. Berkelanjutan; dan
5. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Target indikator jumlah inovasi pelayanan publik DJPT tahun

2024 adalah 1 (satu) inovasi dan diukur pada akhir tahun sehingga sampai dengan triwulan I belum ada capaian.

O. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)

Penyelesaian masalah hukum adalah salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 196 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Masalah hukum itu sendiri merupakan masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui advokasi hukum yang berupa serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum. Indikator Kinerja ini merupakan indikator yang bersifat tahunan, sehingga capaian baru didapatkan pada akhir tahun.

P. Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)

Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi sampling tervalidasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target sampling serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan. Ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan di Ditjen Perikanan Tangkap merupakan data pelabuhan, non pelabuhan, dan perairan darat. Pengukuran indikator kinerja terdapat 2 variabel perhitungan, yaitu 1) Realisasi Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan (X1) dengan bobot nilai 30%; dan/atau 2) Realisasi validasi data produksi KP yang Tervalidasi (X2) dengan bobot nilai 70%.

Lembar kerja data produksi yang tervalidasi bersumber dari LK yang diinput oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, kemudian diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembar kerja terbagi atas 3 jenis diantaranya LK Perairan Darat, LK Pelabuhan dan LK laut non pelabuhan. Capaian indikator kinerja ini belum tersedia pada triwulan 1 tahun 2024, karena periode pengukurannya dilakukan semesteran.

Q. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)

Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian indikator kinerja ini belum dapat dihitung karena metode perhitungan secara tahunan sehingga belum ada capaian pada triwulan 1 tahun 2024.

R. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan IKU yang capaiannya semesteran. Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus melakukan komunikasi yang intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

Terdapat reformulasi pembobotan pada beberapa indikator pada IKPA, salah satunya indikator capaian output, indikator tersebut memiliki bobot tertinggi dan sangat mempengaruhi capaian nilai IKPA satker, dimana sebagian besar capaian output dinilai dan tercapai pada akhir tahun. Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara diakhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

S. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) Penyerapan Anggaran (P) dengan bobot 9,7 persen, (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) dengan bobot 18,2 persen, (3) Pencapaian keluaran (PK) dengan bobot 43,5 persen dan Efisiensi (E) dengan bobot 28,6 persen. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran >90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
2. Nilai Kinerja Anggaran >80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
3. Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
4. Nilai Kinerja Anggaran >50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang; dan
5. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang.

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap triwulan dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Realisasi nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap triwulan 1 Tahun 2024 dihitung secara tahunan.

Beberapa kendala yang teridentifikasi dalam pengisian aplikasi SMART, yaitu:

1. Operator belum memahami cara pengisian sesuai Juknis pengisian aplikasi SMART;
2. Operator tidak mendapatkan data dalam pengisian capaian Realisasi Volume Keluaran;
3. Terdapat pengisian berulang sehingga terjadi akumulasi capaian;
4. Realisasi Indikator eluaran Kegiatan belum diinput hal ini mempengaruhi capaian Nilai Kinerja Satker dan DJPT;
5. Setiap tahun selalu ada pergantian operator yang tidak dilatih oleh operator sebelumnya; dan
6. Belum seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga minim capaian output.

Oleh karenanya, hal-hal tersebut sudah dimitigasi sejak awal sehingga nilai capaian Indikator Kinerja yang didapatkan maksimal.

3.3. Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan satker dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran satker merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nilai perhitungan persentase penyerapan anggaran lingkup Sekretariat DJPT didapatkan berdasarkan persentase dari besarnya realisasi anggaran dibandingkan dengan besarnya pagu satker.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp150.556.866.000,-. Pagu alokasi anggaran tahun 2024 tersebut sebesar Rp55.230.761.000,- digunakan untuk belanja pegawai, Rp89.076.105.000,- untuk belanja barang dan Rp6.250.000.000,- untuk belanja modal. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 ini terealisasi sebesar Rp40.080.158.966,- atau mencapai 26,62%.

Tabel 7. Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	55.230.761.000	17.490.945.736	31,67
2.	Belanja Barang	89.076.105.000	22.405.701.592	25,15
3.	Belanja Modal	6.250.000.000	183.511.638	2,94
	Total	150.556.866.000	40.080.158.966	22,62

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama triwulan I tahun 2024. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Sampai dengan triwulan I-2024, pencapaian IKU Sekretariat DJPT adalah sebesar 104,11%. Berdasarkan target pada rencana aksi Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2024, dari total 19 Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, terdapat 5 (lima) IKU yang telah memiliki capaian, empat indikator dengan kategori capaian baik dan 1 indikator dengan kategori capaian istimewa.

Beberapa IKU yang belum memiliki capaian pada triwulan I-2024, karena IKU dan IKM tersebut pengukurannya bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DJPT diharapkan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan rencana aksi diantaranya adalah:

1. Melakukan langkah percepatan terhadap indikator kinerja yang akan dihitung pada triwulan 2 (semester 1); dan
2. Terhadap IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (persen) yang saat ini capaiannya belum 100%, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh satker DJPT pada triwulan 2.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap kepada Dirjen Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trian Yunanda**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap

Trian Yunanda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (persen)	80
		2	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		4	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	94
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,3
		8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,3
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	100
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	81
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76
		19	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 150.556.866.000,-

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap



Trian Yunanda